

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang jujur dan sejahtera serta menyeluruh, yang telah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Pembangunan nasional ini pemerintah memiliki wewenang untuk melindungi, membimbing serta mengarahkan untuk menumbuhkan suasana terbuka serta menghasilkan gagasan baru supaya dapat menimbulkan kreatif masyarakat.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang didirikan oleh perorangan dengan modal yang tidak terlalu besar. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 sudah terdapat masing-masing kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Dimana kriteria tersebut adalah sebagai berikut usaha mikro adalah usaha yang memiliki jumlah aset 0 sampai 50 juta, serta memiliki omset 0 sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset 50 juta sampai 500 juta dan memiliki omset 300 juta sampai 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan omset total Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar.

Selain itu Masalah permodalan adalah salah satu masalah yang sering dihadapi dan menjadi kelemahan UMKM selain dari hal tersebut penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP juga memiliki fungsi penting dalam memberikan informasi tentang efektifitas dan efisiensi dari kegiatan yang telah dilakukan selama satu periode, yang biasa disebut laporan keuangan.

Selain itu laporan keuangan juga memiliki peranan sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi kredit apakah umkm tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak guna untuk mengembangkan usahanya tersebut.

Pelaksanaan akuntansi begitu penting bagi sebuah unit usaha, dimana penerapan akuntansi dapat menyajikan suatu pembukuan yang baik dan rapi , serta memudahkan untuk melakukan kerja sama dengan perbankan, selain dapat melihat keefektifan dan keefisienan usaha. Penerapan Akuntansi bagi pelaku bisnis maupun pelaku UMKM hendaknya harus sesuai dengan SAK ETAP. Dimana SAK ETAP merupakan salah satu standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Fungsi SAK ETAP pada UMKM yaitu agar umkm memiliki laporan keuangan yang baik serta dapat mengetahui peningkatan atau penurunan pendapatan di setiap periode dan dapat mengontrol pola manajemen meski dengan karyawan yang seadanya.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan entitas meliputi: 1) Neraca; 2) Laporan laba rugi; 3) Laporan perubahan ekuitas; 4) Laporan arus kas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hulu merupakan ujung tombak pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM di Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hulu.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi dan UMKM sangat berperan penting dalam upaya untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu Dinas Koperasi harus bekerja dengan baik dalam pembinaan UMKM. Saat ini jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Rokan Hulu dapat kita lihat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah UMKM di Rokan Hulu

Jenis	Jumlah
Usaha Menengah	77
Usaha Kecil	1.056
Usaha Mikro	398
Total	1.531

Sumber :Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Rokan Hulu (2015)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah UMKM yang tercatat pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hulu berjumlah 1.531 UMKM yang terdiri dari Usaha Menengah berjumlah 77 Usaha Kecil berjumlah 1.056 dan Usaha Mikro berjumlah 398. Jumlah UMKM tersebut terbagi dalam berbagai sektor seperti yang dapat kita lihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2
Sektor UMKM di Kab. Rokan Hulu

No	Sektor	Jumlah
1.	Produksi	337
2.	Pertambangan	5
3.	Industri	45
4.	Listrik, Gas, Air Bersih	44
5.	Konstruksi	94
6.	Perdagangan Hotel dan Restoran	11
7.	Angkutan dan prasana	20
8.	Biro jasa	94
9	Perdagangan	881
	Jumlah	1.531

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Rokan Hulu (2015)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 9 sektor yaitu sektor produksi berjumlah 337 sektor pertambangan berjumlah 5, sektor industri berjumlah 45, sektor listrik, gas dan air bersih berjumlah 44, sektor konstruksi berjumlah 94, sektor perdagangan hotel dan restoran berjumlah 11, sektor angkutan dan prasana berjumlah 20, sektor biro jasa berjumlah 94, sektor perdagangan berjumlah 881. Kesembilan sektor tersebut tersebar pada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian“ **Penerapan Akuntansi dan Kesesuaian dengan SAK ETAP pada UMKM di Kabupaten Rokan Hulu** “.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi pada UMKM di Kabupaten Rokan Hulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kab. Rokan Hulu

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemilik usaha mikro kecil menengah

Di harapkan dengan penerapan akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP pada usaha mikro kecil menengah dapat dapat dijadika acuan untuk penyusunan laporan keuangan agar perkembangan UMKM semakin baik.

2. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya sebagai tambahan referensi dan juga dijadikan sebagai kajian dalam membandingkan teori.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan pengetahuan tambahan mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP

1.5 Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dan mengingat bahwa luasnya masalah yang akan di teliti maka peneliti membatasi permasalahan hanya pada UMKM di Kecamatan Rambah Hilir yang memiliki asset diatas RP 100.000.000.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Neneng Salmiah, Indarti dan Inova Fitri Siregar dengan judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (Pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop dan UMKM Kota Pekanbaru) .Tujuan Penelitian ini Untuk Mengetahui bagaimana bentuk Penerapan Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop dan umkm Kota Pekanbaru

Namun penelitian ini jauh dari unsur penjiplakan atau plagiat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum nya terletak pada Tempat Penelitian UMKM di Kabupaten Rokan Hulu, Objek Penelitian UMKM di Kecamatan Rambah Hilir dan Teknik Pengumpulan Data hanya penyebaran Kuesioner pada UMKM di Kecamatan Rambah Hilir saja serta penelitian ini hanya membandingkan teori penerapan akuntansi dan kesesuaian nya dengan SAK ETAP , dan tahun Penelitiannya 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Barisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan penelitian yang relevan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis penelitain, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang deskripsi tempat penelitian, hasil pengolahan data kuesioner dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas, kesimpulan yang merupakan inti dari semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dan juga mengemukakan tentang saran-saran demi mengembangkan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:5) Definisi akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian- kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil- hasilnya.

Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Michell Suharli (2006:49) bahwa pengertian Siklus akuntansi adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas, dan proses dari awal sampai akhir dimulai dari awal seperti lingkaran yang tidak akan pernah putus.”Pengertian siklus akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:18) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa “Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka di-input ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan”.Kesimpulan dari kedua definisi diatas, siklus akuntansi merupakan suatu proses pengolahan data yang terdiri dari urutan transaksi yang berda sarkan bukti transaksi, sehingga dapat menghasilkan informasi laporan keuangan.

Siklus akuntansi diungkapkan rudianto (2012:16), bahwa ” siklus akuntansi adalah urutan kerja yang harus dilakukan oleh akuntan sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan”. Siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut: 1. Transaksi Usaha 2. Pembuatan Bukti Asli 3. Pencatatan dalam Buku Harian (Jurnal) 4. Pencatatan ke Buku Besar dan Buku Tambahan 5. Pembuatan Neraca saldo 6. Neraca Lajur Penyesuaian 7. Laporan Keuangan 8. Jurnal Penutup 9. Neraca Saldo Setelah Penutup

2.1.2 Informasi Akuntansi

Menurut Belkaoui dalam AUFAR (2013:50) Informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan - pilihan dan alternative tindakan. Pengguna informasi akuntansi untuk perencanaan strategi pengawasan manajemen dan pengawasan operasional.

Berikut adalah uraian terkait tujuan dari sistem informasi akuntansi:

- 1 Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi.
- 2 Memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian bisnis.
- 3 Melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan.
- 4 Efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan
- 5 Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode akuntansi yang tepat.

Dari beberapa tujuan di atas dapat dikatakan sistem informasi akuntansi disini sangat membantu perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan baik dan tepat. Selain menghemat waktu dan biaya, sistem informasi ini pun juga memberikan dampak untuk kinerja bisnis selanjutnya dengan sebuah pengambilan keputusan yang tepat. Sistem informasi akuntansi ini memiliki tiga sub sistem yang masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri seperti sistem pemrosesan transaksi, sistem buku besar atau pelaporan keuangan, dan sistem penutupan dan pembalikan. Dimana sub sistem tersebut dapat memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang secara langsung dapat memberikan pengaruh pada pemrosesan transaksi keuangan.

2.2 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009 .

Menurut SAK ETAP (2009), SAK ETAP dimaksudkan untuk: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa kuntabilitas publik, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas

publik signifikan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh penggunaan eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga permeringkat kredit.

Ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika : proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal; atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan standar tersebut.

2.2.1 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Berdasarkan SAK ETAP (2009) laporan Keuangan tanpa entitas public meliputi :

1. Neraca;

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas.

2. Laporan laba rugi;

Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau labaper saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto.

3. Laporan perubahan ekuitas;

Dalam laporan ini menunjukkan:

- Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk di dalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, atau

- Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik termasuk jumlah investasi, penghitungan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

4. Laporan arus kas;

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

2.2.2 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian yang wajar dari laporan keuangan SAK ETAP antara lain dijelaskan dalam SAK ETAP (2009) sebagai berikut:

1) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban.

2) Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

3) Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.

4) Frekuensi Pelaporan

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.

2.3 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Tulus Tambunan (2012) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 disebutkan bahwa:

a Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang .

2.3.1 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang nomer. 20 tahun 2008 pasal 6 disebutkan bahwa:

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.3.2 . Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM

Menurut Undang-Undang nomer. 20 tahun 2008 pasal 4 disebutkan bahwa prinsip pemberdayaan UMKM sebagai berikut :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Sedangkan pada pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pemberdayaan UMKM sebagai berikut :

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.3.3 Peranan UMKM

Menurut Tulus Tambuna (2012) UMKM memiliki peran sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi.

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hetika dan Nurul Mahmuda	Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM Kota Tegal (2017)	Penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kota Tegal masih sangat sederhana. Para pelaku UMKM di Kota Tegal masih belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.
2	Fitriani Saragih dan Surikayanti	Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada UKM masih sederhana. karena latar belakang pendidikan, tetapi juga disebabkan oleh sosialisasi atau pelatihan dari pihak pemerintah dan lembaga yang membidangi UKM masih kurang maksimal.
3	Neneg Salmiah, Indarti dan Inova Fitri Siregar	Analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UMKM dikecamatan Sukajadi Pekanbaru	Bahwa rata-ratanya 40% penerapan akuntansi bagi UMKM Kecamatan Sukajadi Binaan Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru secara lengkap atau sesuai tahapan- tahapan serta sesuai dengan SAK ETAP.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

objek penelitian adalah sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal . yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Rambah Hilir.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan suatu gejala sosial dalam arti kata penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung.

3.3 Populasi dan Sample

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan . Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 99 UMKM yang ada di Kecamatan Rambah Hilir.

Menurut Sugiyono (2017:81) Sample adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut . Metode Pengambilan sampel

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* , Menurut Sugiyono (2013:218-219) *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu adapun pertimbangan tersebut antara lain:

1. Umkm yang berada di Kecamatan Rambah Hilir
2. Umkm yang memiliki asset diatas Rp 100.000.000
3. Umkm di Kecamatan Rambah Hilir dari berbagai sektor

Berdasarkan teknik pengambilan sample dari 99 UMKM yang berada di Kecamatan Rambah Hilir terdapat 35 UMKM yang memenuhi kriteria dan dapat dijadikan sample dalam penelitian.

Tabel 3.1
Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dijadikan Sample

No	Nama Pemilik	Sektor Usaha	Jumlah Aset
1	Muhadi	Cv Puma Sepakat	Rp 150.000.000
2	Bu Uju	Gas Elpiji	Rp 150.000.000
3	Padilah	Aini Farma Apotik	Rp 150.000.000
4	Anto Siagian	R- Mart	Rp 100.000.000
5	Mulyani	Cv Pisang Sarawak	Rp 100.000.000
6	Purnama Hadi	Cv Arafah	Rp 110.000.000
7	M Isa Asari	Cv Rahmi	Rp 100.000.000
8	Saipul	Kontruksi	Rp 350.000.000
9	Jajang Dani	UD.GRS. Perdana	Rp 200.000.000
10	Purnama	UD . Mutiara. Prabot	Rp 100.000.000
11	Dedi Siagian	Dedi Siagian	Rp 150.000.000
12	Olin Suryana	UD. Arham Nugroho	Rp 100.000.000
13	N . Halimah	Ilham Hanapi HRP	Rp 315.000.000
14	Nugroho	Nugroho	Rp 150.000.000

15	Sumarno	Peron Sumarno	Rp 190.000.000
16	Tukirin	Sumber Urip	Rp 132.000.000
17	Yuskirmar	Cv Malafari Fanel	Rp 145.000.000
18	Suwarno	UD Mitra Tani	Rp 100.000.000
19	Siti Khoiriyah	BUMDES Bina Usaha	Rp 598.000.000
20	Robbi	TBS Sawit Anugrah	Rp 146.000.000
21	Nasirin	Mela Pelaminan	Rp 137.900.000
22	Sopan Fauzi	TBS Tiwi Jelia	Rp 440.000.000
23	Jaja	UD. Kurnia Putra	Rp 117.100.000
24	Hasan Basri	CV. Hidayat Bangunan	Rp 150.000.000
25	Perlindungan Lumban	Toko Maju Bersama	Rp 634.200.000
26	Devi Arisandi	Toko Obat Adib	Rp 134.200.000
27	Piter Harianto	TBS Pilar Z	Rp 100.000.000
28	Nasrul	Air Minum Isi Ulang	Rp 100.000.000
29	Kamsani	Kamsani	Rp 100.000.000
30	Suryadi	UD Surya Mitra	Rp 350.000.000
31	Andi Dwi Warma	CV Riandi Prima Jaya	Rp 200.000.000
32	Rustam Ahmad	CV Rezki Perkasa	Rp 200.000.000
33	H . Gholoib	Toko Arafah	Rp 500.000.000
34	Mimma Sari	Swalayan Adek	Rp 100.000.000
35	Tuyanto	Toko Dayya Jaya	Rp 100.000.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Rokan Hulu (2015)

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada UMKM

Kecamatan Rambah Hilir terkait dengan penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber Primer, dimana Sumber primer dalam penelitian ini melalui pelaku UMKM di Kecamatan Rambah Hilir .

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil koesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menghitung skor yang diperoleh dalam bentuk presentase. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan besar presentase alternative jawaban responden (Sugiyono) adalah :

$$P = f/n \times 100\%$$

Ket :

P = presentase

F= frekuensi alternatif jawaban

N= jumlah sample

Kriteria interpretasi skor Dean J . Champion sebagai berikut:

- a. 0% - 25%, berarti penerapan akuntansi tidak sesuai dengan SAK ETAP
- b. 25% - 50%, berarti penerapan akuntansi kurang sesuai dengan SAK ETAP
- c. 50% - 75%, berarti penerapan akuntansi cukup sesuai dengan SAK ETAP
- d. 75% - 100%, berarti penerapan akuntansi sangat sesuai dengan SAK ETAP